

Model Pertukaran Pada Masyarakat Nusantara Kuna Kajian (Pengujian) Arkeologis

Bugie Kusumohartono

Keywords: modelling, barter, economy, trade, archaeology

How to Cite:

Kusumohartono, B. Model Pertukaran Pada Masyarakat Nusantara Kuna Kajian (Pengujian) Arkeologis. Berkala Arkeologi, 15(3), 105-110.
<https://doi.org/10.30883/jba.v15i3.680>



Berkala Arkeologi

<https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 15 No. 3, 1995, 105-110

DOI: [10.30883/jba.v15i3.680](https://doi.org/10.30883/jba.v15i3.680)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

MODEL PERTUKARAN PADA MASYARAKAT NUSANTARA KUNA : KAJIAN (PENGUJIAN) ARKEOLOGIS

Bugie Kusumohartono
(Balai Arkeologi Yogyakarta)

Pertukaran Dalam Arkeologi

Salah satu bentuk perilaku ekonomi yang paling awal dalam kebudayaan manusia adalah pertukaran (*exchange*). Dari segi proses, pertukaran adalah penyebaran benda secara keruangan, dari individu ke individu lain, dan dari satu kelompok ke kelompok lain (Earle, 1982). Karena itu kajian pertukaran memberi tekanan pada kesalingterkaitannya antara transaksi barang dengan organisasi masyarakat (Earle dan Ericson, 1977).

Studi pertukaran mencoba untuk selalu dapat memahami proses yang berlangsung dalam pemindahan barang dari satu tangan ke tangan yang lain dan dari satu kelompok manusia ke kelompok manusia yang lain. Dalam kaitan ini -- merujuk Schiffer (1976) -- arkeologi berupaya untuk menjembatani kesenjangan dalam memahami proses yang muncul di antara perilaku manusia dan budaya bendawi.

Manusia -- baik secara individual maupun secara sosial -- merupakan aspek kuat dalam pertukaran. Dua aspek penting ini mendasari munculnya dua kubu pendekatan dan teori yang saling berbeda dalam memahami fenomena pertukaran tersebut. Yang memberi tekanan utama pada aspek individual berkelompok dalam kubu *formalism*, sedangkan yang memberi tekanan besar pada aspek kemasyarakatan tergabung dalam kubu *substantivism*.

Karena beranjak dari aspek individu, pendekatan yang pertama memperlihatkan perhatian yang lebih khusus pada pertukaran dalam kerangka proses pengambilan keputusan bagi kepentingan populasi dan evolusi yang ditimbulkan oleh proses tersebut sebagai akibat dari upaya penekanan biaya ekonomik dan efisiensi. Dengan demikian pendekatan ini akan dapat memotret organisasi dari sistem pertukaran tersebut, khususnya pada aspek regulasi kelembagaan yang berhubungan dengan distribusi dan nilai atas barang (Earle 1982; Hodder 1982).

Sementara itu kubu yang kedua beranggapan bahwa aktivitas perekonomian berada di dalam suatu kelembagaan umum sosialpolitik. Oleh karena itu kegiatan perekonomian -- dalam hal ini pertukaran -- secara khusus mencerminkan sistem sosialpolitik, dan pola kebudayaan. Pada sisi ini, pendekatan *substantivism* mengembangkan minatnya pada aspek-aspek lain

dari kebudayaan, sehingga pertukaran memperlihatkan kaitan yang erat dengan aspek simbolik, sofistikasi sosial, dan aspek proses perubahan kebudayaan (Earle 1982; Hodder 1982).

Model Pertukaran Redistribusi Nusantara Kuna

Dengan merujuk pada K. Polanyi, Hodder (1978) mengklasifikasikan mekanisme pertukaran "primitif" atas tiga kategori, yaitu:

1. Pertukaran resiprokal (*reciprocal*);
2. Pertukaran redistribusi (*redistributive*) dan
3. Pertukaran pasar tradisional (*traditional market*).

Pertukaran resiprokal adalah kewajiban memberi dan menerima di antara di antara individu yang berbeda hubungan sosialnya. Sementara itu yang disebut dengan pertukaran redistribusi berkaitan dengan kewajiban membayarkan barang dan jasa kepada pemuka masyarakat (misal: raja, kepala, pendeta), yang kemudian membagikan sebagian perolehannya baik untuk kepentingan umum maupun sebagai hadiah bagi seseorang. Di luar model pertukaran resiprokal dan redistribusi, masyarakat tradisional kemungkinan menerapkan model pertukaran pasar tradisional. Dalam sistem ini, para pelakunya tidak memiliki ikatan sosial tertentu yang mewajibkan mereka untuk melakukan pertukaran dan dimungkinkan adanya tawar-menawar di dalamnya.

Di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik ditengarai berkembangnya suatu sistem pertukaran yang bersifat redistribusi. Pertukaran tersebut melibatkan elite masyarakat di satu pihak, dan warga masyarakat kebanyakan di pihak yang lain. Dalam berbagai rujukan, elite masyarakat yang dimaksud sering disebut dengan istilah *big men*. *Big men* memiliki otoritas untuk mengatur atau mengarahkan kegiatan kaumnya (*subordinat*) (Malinowski, 1922). Otoritas tersebut tercermin, misalnya pada pengendalian distribusi lahan, menetapkan upeti yang diterima dari warga masyarakat (Bellwood, 1987), maupun dalam bentuk yang lebih terbatas, misalnya sebatas persuasi dan pengaruhnya pada proses pengambilan keputusan dalam klen (Rappaport, 1984). Namun hal itu menjadi signifikan manakala kasus-kasus yang diputuskan berkaitan dengan permasalahan perang, upacara, wanita, dan lahan pertanian.

Status khusus tersebut diperoleh melalui prestasi tertentu (*achieved*), dan bukan turun-te-

murun (*heredity*) (Jennings, 1979). Selain itu status khusus tersebut berkaitan erat dengan kewajiban untuk memberi, hal ini merupakan esensi dari *potlatch* (Mauss, 1992), misalnya dalam bentuk penyelenggaraan pesta jasa (*feast of merit, feast-giving*) oleh "calon" *big man* dan bahkan persaingan antar *big man* tercermin pada penyelenggaraan pesta-pesta jasa tersebut (Oliver, 1955). Dengan kata lain kemurahan-hatian (*generosity*) memiliki motivasi kuat pada tujuan politik :

Seorang kepala suku akan dapat tetap mempertahankan kekuasaan atas suku, desa dan keluarganya, dan tetap menduduki posisinya sebagai kepala dalam lingkungan bangsanya maupun di luar, hanya bila ia dapat membuktikan bahwa ia disayangi oleh para roh dan memiliki keberuntungan dan bahwa ia terpengaruh oleh keberuntungan. Cara satu-satunya untuk mempertunjukkan keberuntungannya tersebut ialah dengan memboroskannya bagi penghinaan orang-orang lainnya, dengan mendudukan mereka itu sebagai "dalam naungan namanya"... (Mauss, 1992: 56)

Pembesar-pembesar pada masyarakat tradisional umumnya, termasuk suku-suku dari Polynesia sampai Afrika, biasanya hanya mencapai pangkat tinggi karena mampu menyalurkan manfaat berupa bahan kepada sejumlah anak buah yang lebih besar dari orang lain (Miksic, 1981).

Dengan kata lain, dalam konsep ini kemurahan-hatian merupakan atribut pokok bagi kekuasaan. Di balik itu tentu pada dasarnya para *big men* haruslah individu yang memiliki status ekonomi tinggi dalam komunitasnya, sehingga dapat memenuhi "kewajiban" bagi subordinatnya (Bellwood, 1987; Malinowski, 1922; Oliver, 1955).

Diduga kuat pesta-pesta jasa telah dipraktikkan sekurangnya pada fase budaya Megalitik di Nusantara. Menurut para pakar prasejarah Nusantara, penyelenggaraan pesta jasa ditandai dengan pendirian suatu menhir (Soejono, 1984), yang diduga kuat merupakan monumen yang menandai diperolehnya status *big man* oleh si penyelenggara pesta jasa. Penghormatan kepada sang *big man* berlanjut terus walaupun yang bersangkutan telah mati, dan bahkan Soejono (1984) menginterpretasikan bahwa menhir-monumen penanda pesta jasa akhirnya menjadi personifikasi dari tokoh yang bersangkutan. Menhir tersebut berfungsi sebagai media komunikasi antara dunia hidup dengan alam arwah, sehingga walaupun telah mati namun kemurahan-hatian sang tokoh dapat tetap diminta dan dinikmati oleh subordinatnya.

Di Jawa saat ini, penyelenggaraan pesta jasa terlihat mencolok manakala berlangsung pelaksanaan proses kegiatan pemilihan *lurah* di desa-desa. Para calon *lurah* berkompetisi dalam hal penyaluran barang dan bahan kepada komunitasnya

untuk menjangkau dukungan suara sebanyak mungkin. Simpati dari para pendukung tidak diperoleh melalui rancangan program yang berprospek baik, namun diperoleh dari intensitas kemurahan-hatian calon *lurah* yang bersangkutan.

Pertukaran Nusantara Kuna

Dengan merujuk pada paparan di atas, model pertukaran redistribusi bukan mustahil berkembang pula di Nusantara pada jaman kuna (sekitar abad V-XVI M). Suatu pengujian pada sumber-sumber tekstual telah dilakukan, dan memperoleh gambaran tentang pertukaran redistribusi yang pernah berkembang pada masyarakat Jawa Kuna (Kusumohartono, 1991).

Data-data yang relevan --dalam hal ini berhubungan dengan segi-segi sosial dan ekonomi -- dari periode klasik awal disajikan oleh J.N. Miksic (1981). Berdasarkan catatan-catatan perjalanan pelaut Eropa, Geografi dan Periplus Mare Erythraeus, sekurangnya sejak abad ke-2 Masehi telah berlangsung kegiatan perniagaan dengan masyarakat Nusantara. Kekhususan dari sistem perniagaan tersebut adalah prosedurnya yang tidak didasarkan pada hukum pasar namun diatur oleh suatu adat di mana aktivitas ekonomi tersebut lebih bersifat pertukaran (Leur, 1967). Pada umumnya pertukaran tersebut hanya dapat dilangsungkan secara terbatas dengan kalangan penguasa lokal, melalui aktivitas persembahan anugerah. J.N. Miksic menyebut sistem prosedur ini dengan istilah sistem *emperion*.

Berlangsungnya sistem *emperion* pada jaman Indonesia kuna tersirat pula pada catatan-catatan pelaut-pelaut Cina yang melakukan misi politik dan niaga ke Nusantara. Barang dan bahan bernilai tinggi dan khas dari masing-masing daerah asal pelaku pertukaran mendominasi aktivitas tersebut (Groeneveldt, 1960). Nilai komoditas dari Nusantara yang dipertukarkan, menurut istilah Bambang Sumadio (1984), ... haruslah berupa barang bernilai tinggi untuk konsumsi kalangan atas.

Lebih lanjut, menurut J.N. Miksic (1981), sistem ini didasari oleh kebutuhan penguasa-penguasa lokal untuk mengumpulkan kekayaan, khususnya barang dan bahan langka, untuk motif-motif politik. Selain memiliki fungsi sebagai lambang status, bahan dan barang berharga tersebut didistribusikan kepada komunitasnya sebagai anugerah yang dilandasi oleh "semangat kemurahan-hatian". Warga komunitasnya menerima anugerah tersebut melalui berbagai aktivitas, baik yang berwujud upacara maupun yang berbentuk dukungan material pada berbagai proyek umum.

Kiranya bukanlah hal yang kebetulan bahwa anugerah berupa bahan dan barang dari penguasa Nusantara kuna sudah terekam pada sumber

tekstual yang paling awal (abad ke-5 M), yaitu tugu yupa dari Kutai. Prasasti-prasasti tersebut menyuratkan sebagai berikut (Sumadio, 1984) :

...Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri (selamatan yang dinamakan) emas-amat-banyak. Buat peringatan kenduri (selamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh para brahmana (garis bawah oleh penulis).

...Dengarkanlah oleh sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon Kalpa (yang memberi segala keinginan), dengan sedekah tanah (yang dihadiahkan)... (garis bawah oleh penulis).

Tugu ini ditulis buat (peringatan) dua (perkara) yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak (kental), dengan lampu serta malai bunga (madu? - pen.) (garis bawah oleh penulis).

Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api... (garis bawah oleh penulis).

Dari masa yang sedikit lebih muda, informasi serupa disuratkan pula pada prasasti Tugu yang didapatkan di Tugu, Jakarta. Prasasti tersebut menyuratkan sebagai berikut (Sumadio, 1984) :

Dulu sungai (yang bernama) - Candrabhaga telah digali oleh maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat (yakni raja Purnawarman) buat mengalirkannya ke laut, setelah (sungai ini) sampai di istana kerajaan yang termashur. Di dalam tahun keduapuluh-duanya dari takhta yang mulia raja Purnawarman yang berkilaukilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji segala raja, (maka sekarang) beliau menitahkan pula menggali sungai yang permai dan berair jernih. Gomati namanya, setelah sungai itu mengalir di tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pendeta neneknda (Sang Purnawarman). Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 paro-petang bulan Phalguna dan disudahi pada hari tanggal 13 paro-terang bulan Caitra, jadi hanya 21 saja, sedang galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Selamatan baginya dilakukan oleh para brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan (garis bawah oleh penulis).

Prasasti-prasasti di atas, terutama pada bagian yang bergaris bawah, menggambarkan anugerah bahan dan barang bernilai tinggi dari penguasa kepada subordinatnya di dalam suatu kegiatan pesta jasa (kenduri atau selamatan). Bahkan pada prasasti Tugu disebutkan pula anugerah proyek

pembangunan fisik berupa penggalian kanal atau terusan yang kemungkinan besar berhubungan dengan penanggulangan bencana banjir. Satu hal yang unik bahwa pesta jasa tersebut ditindaklanjuti oleh pendirian yupa atau tugu batu peringatan yang sekaligus berfungsi sebagai prasasti.

Gejala penyaluran bahan dan barang dalam pesta jasa pada Nusantara kuna juga dijumpai pada berbagai upacara penetapan *sima*. Dari rincian upacara penetapan *sima* yang direkam dalam beberapa prasasti abad ke-9/10 Masehi (Haryono, 1980) tersebut, terdapat dua elemen yang berkaitan dengan telaah ini. Pertama, adalah selalu (?) dijumpainya pemberian anugerah *pasak-pasak* oleh penguasa kepada pejabat pemerintah mau-pun kepada warga masyarakat. Kedua, hampir selalu dijumpainya informasi mengenai kegiatan makan bersama (kenduri?).

Sementara itu yang berkaitan dengan dukungan pada berbagai proyek fisik untuk kepentingan masyarakat, data prasasti dan naskah memberikan informasi yang cukup memadai. Dalam kajian Van Setten van der Meer, prasasti-prasasti dari fase Sindok dan Airlangga banyak menyuratkan tentang dukungan kedua penguasa tersebut kepada pembangunan dan perawatan sarana irigasi pengairan sawah rakyat. Sarana-sarana irigasi yang dibangun sekitar abad ke-10 tersebut berfungsi baik sampai dengan fase Majapahit, bahkan dikembangkan dalam intensitas yang semakin tinggi oleh penguasa-penguasa abad ke-14/15 M. tersebut (Meer, 1979).

Untuk kepentingan kehidupan keagamaan masyarakat, penguasa Nusantara kuna memberikan dukungannya pada pembinaan sarana-sarana ibadah. Dalam Nagarakrtagama pupuh 82 bait ke-2 dan 3 diperoleh gambaran tentang perhatian dan prakarsa penguasa kepada pembangunan dan pemeliharaan bangunan-bangunan keagamaan, biara, maupun perdikan yang berfungsi bagi kepentingan agama.

Selain kewajiban memberi kewajiban "membayar kembali" merupakan esensi di dalam *pot-latch* (Mauss, 1992). Pada masyarakat Nusantara kuna, kewajiban tersebut tercermin pada pranata pajak, tenaga (*gawai/buat haji*), dan upeti (Kusumohartono, 1985). Menurut Boechari (1981), pajak adalah sumber pemasukan kas yang terpenting bagi kerajaan-kerajaan kuna di Nusantara. Pentingnya pajak bagi penguasa tercermin dalam uraian Nagarakrtagama pupuh 88 bait ke-6.

Sistem pajak pada masa itu dilembagakan dalam bentuk pajak tanah/hasil bumi, pajak perdagangan, dan pajak atas hasil kerajinan. Sementara itu pembayaran pajak —dan juga tenaga rakyat— diterima oleh penguasa secara *in natura* maupun dalam bentuk alat tukar yang berlaku (Wuryantoro, 1982).

Penerimaan berupa upeti diterima oleh penguasa baik dari subordinatnya maupun dari pertukaran yang dilakukannya dengan misi dan pedagang asing (Nagarakrtagama pupuh 85 bait ke-5). Upeti dari luar tersebut merupakan sarana penumpukan komoditas bersifat asing dan langka di tangan penguasa yang diperoleh melalui pertukaran dengan komoditas khas produk *hinterland*. Pada gilirannya komoditas tersebut didistribusikan lagi kepada subordinatnya sebagai pencerminan dari kemurahhatiannya (Kusumohartono, 1985).

Rekonstruksi ini bukan model yang satu-satunya terdapat pada masyarakat Nusantara Kuna. Di luar mekanisme pertukaran redistribusi, kemungkinan masih terdapat model-model lain yang berkembang. Tetapi fokus kajian ini akan ditekankan pada yang pertama.

Pengujian Arkeologi Dan Permasalahannya

Berkembangnya mekanisme pertukaran redistribusi pada masyarakat Nusantara kuna sudah terverifikasi melalui kajian sumber-sumber tekstual. Permasalahannya adalah sejauhmana kajian arkeologis berprospek diterapkan untuk menguji fenomena sejarah tersebut.

Dalam pengujian semacam itu, Hodder (1978) berpendapat bahwa unit-unit analisis yang patut mendapatkan perhatian utama adalah:

1. Pola permukiman pada jenjang makro; serta
2. Pola distribusi dari obyek yang dipertukarkan.

Pola Permukiman

Yang dimaksudkan di sini adalah distribusi dari permukiman yang digunakan oleh masyarakat yang saling berinteraksi pada kerangka temporal tertentu. Mengingat mekanisme pertukaran distribusi tersebut berlangsung di dalam masyarakat yang relatif terpusat dan hirarkis (*centralised hierarchical societies*) maka tidak cukup bagi kita hanya membatasi perhatian pada distribusinya saja namun juga hirarki permukimannya. Artinya, secara teoritik terdapat permukiman pada jenjang atas (pusat), serta permukiman pada satu atau lebih jenjang di bawahnya (Hodder dan Orton, 1976).

Dengan demikian maka pola permukiman tersebut tidak cukup hanya merupakan sebaran titik-titik, yang menandai situs-situs permukiman, pada suatu peta. Namun harus pula dapat ditunjukkan dengan akurat jenjang dari masing-masing permukiman pada jamannya. Di lapangan, jenjang dari situs permukiman diindikasikan oleh variabel ukuran (*size*) pemukimannya atau, mengingat semakin tinggi jenjangnya maka semakin luas juga situsnya (Paynter, 1983).

Selain pengujian melalui analisis pada pola (jenjang) permukiman, pengujian arkeologis atas fenomena pertukaran redistribusi dilakukan pula

melalui analisis pada keberadaan dan jenjang pergudangan. Kerangka pikir di balik analisis pergudangan didasarkan atas kecenderungan penumpukan barang pada tangan penguasa sehingga dibutuhkan fasilitas penyimpanan pada setiap jenjang kekuasaan. Dengan demikian secara hipotetik akan didapati fasilitas pergudangan di permukiman pada jenjang atas, di mana gudang yang dimiliki oleh raja akan lebih besar ukurannya dari pada gudang milik elite lainnya.

Penelitian pola permukiman di Indonesia yang menghasilkan gambaran tentang sistem jenjang permukiman di masa lampau sejauh ini belum berhasil dicapai. Jaman kuna dengan informasi kesejarahan yang relatif lengkap, misalnya tentang Majapahit pun, baru dapat diperoleh informasi tentang toponim-toponim pentingnya saja, yang pada umumnya tersebar di kawasan timur Jawa (Eriawati J., 1991). Upaya untuk melakukan penjenjangan atas pemukiman-pemukiman jaman Majapahit belum tuntas dilakukan, kecuali atas sampel yang terbatas: Trowulan, Biting, Medowo, Caruban, dan Wonoboyo (Kusumohartono, 1993).

Pola Distribusi Dari Obyek Yang Dipertukarkan

Melihat informasi yang dapat dipetik dari sumber tekstual di atas, maka diperoleh gambaran bahwa jenis obyek yang dipertukarkan sangat luas sifatnya. Beberapa contoh dari obyek yang dipertukarkan ialah: kain, perhiasan emas dan perak, makan dan minum, madu, minyak, hewan, tanah-lahan, lampu, biaya proyek, hasil bumi, kerajinan, alat tukar, tenaga, dan lain sebagainya. Tentu saja lingkup obyek yang dipertukarkan dan relevan bagi kajian arkeologi dibatasi hanya pada yang bersifat artefak (barang dan bahan). Itu pun yang tersisa sebagai artefak arkeologis tidak banyak, misalnya: perhiasan emas dan perak, lampu, kerajinan dari bahan yang tidak mudah rusak, mata uang, serta yang sejenis.

Atas artefak yang dipertukarkan, terdapat tiga variabel yang harus ditelaah:

1. Karakter kimiawi, petrografi, gaya dari artefak yang dikaji sebagai sarana penentu sumber atau asal dari artefak-artefak tersebut,
2. Menyusun model deskriptif tentang pola keruangan dari artefak yang diidentifikasi sebagai komoditas pertukaran,
3. Ketiga atau terakhir, menyusun model rekonstruksi tentang organisasi masyarakat pelakunya dengan diperkaya oleh analogi dan komparasi pada model-model yang masih hidup maupun yang saat ini telah punah (Earle dan Ericson, 1977; Kusumohartono, 1993).

Secara umum terdapat tiga pendekatan deskriptif dalam penentuan pola keruangan tersebut yaitu :

1. Penyebaran titik dalam kawasan (*regional point scatters*),
2. Analisis regresi, dan
3. Analisis kecenderungan formasi artefak di permukaan (*trend surface analysis*) (Hodder dan Orton 1976).

Tentu saja pilihan atas masing-masing model analisis tersebut disesuaikan dengan masalah yang ingin dijawab serta visualisasi macam apa yang dituntut oleh penelitian yang bersangkutan.

Dalam kenyataannya, tidak sepenuhnya mudah membedakan artefak yang dipertukarkan melalui mekanisme resiprokal atau pasar tradisional dengan artefak hasil pertukaran redistribusi. Dalam hal ini perhatian harus diberikan pada artefak-artefak dari jenjang-jenjang permukiman yang berbeda, sehingga dapat dipahami status artefaknya.

Dalam kaitan itu banyak faktor lain yang patut pula diperhatikan guna memahami mengapa suatu artefak (dapat) dipindahtempatkan dari satu situs ke situs lain. Faktor lain tersebut, misalnya, adalah pentingnya efek jarak antar situs permukiman yang mau tidak mau berakibat bagi jelajah barang dan jasa. Beberapa faktor pembatas lain yang diajukan oleh Hodder (1978) adalah: perbedaan geografi, bahasa, politik, dan etnik. Sedang beberapa faktor pendorong adalah sebagai berikut: migrasi, perang, musiman, dan prestise.

Kajian arkeologi semacam itu tentu akan sangat mengandalkan pada unit analisis artefak tertentu (misalnya perhiasan emas, perak, mata uang, prasasti?) yang dijumpai pada situs-situs permukiman yang telah diketahui jenjangnya. Jelas hal itu merupakan penelitian yang berskala besar apabila semuanya dilakukan dalam bentuk penelitian primer.

Penutup

Ada dua gejala budaya -- migrasi dan pertukaran -- yang kemungkinan besar sulit dibedakan apabila kita hanya terpaku pada "data artefak pertukaran" semata. Sebenarnya hal ini dapat dengan jelas dibedakan mengingat pada dasarnya gejala pertukaran cenderung akan memperlihatkan persamaan pada artefak yang dipertukarkan saja. Sebaliknya gejala migrasi cenderung memperlihatkan persamaan pada seluruh sistem artefaknya.

Perbedaan ini dapat diidentifikasi apabila penelitian arkeologi dengan fokus pada artefak tertentu dilakukan pada skala ruang kawasan (*regional*). Tentu saja pola (jenjang) permukiman di dalam kawasan yang spesifik tersebut harus sudah dapat digambarkan sebelumnya.

Nampaknya sudah dirasa perlu untuk mulai mengembangkan studi kawasan dalam arkeologi dengan prioritas pada penyusunan peta distribusional situs-situs semasa. Peta-peta semacam itu akan

sangat bermanfaat sebagai dasar bagi studi penjenjangan permukiman melalui prinsip *rank-size rule*. Apabila peta pola permukiman semacam itu sudah dapat diperoleh maka pengujian arkeo-gis atas mekanisme pertukaran redistribusional akan dapat dilakukan.

Permasalahan dari pengujian arkeologis terhadap berkembangnya mekanisme pertukaran redistribusi di antaranya adalah pada unit analisisnya yang relatif terbatas, baik jenis maupun distribusinya. Penelitian yang harus dilakukan pun harus berskala luas, pada jenjang-jenjang permukiman yang berbeda dalam kerangka temporal tertentu, dan menuntut dukungan sumberdaya yang relatif besar.

Penyelenggaraan penelitian semacam itu secara lebih efisien bisa dilakukan sepanjang akses ke berbagai sumber informasi penelitian arkeologi dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini penting diperhatikan, mengingat sumber-sumber informasi tentang penelitian berbagai situs di Indonesia tersebar di berbagai lembaga. Jalan keluar yang terbaik adalah tersedianya satu sistem pangkalan data (*data base*) arkeologi terpadu yang meningkatkan aksesibilitas sumber-sumber informasi arkeologi tersebut.

KEPUSTAKAAN

- Bellwood, Peter. 1987. **The Polynesians, Prehistory of an Island People**. Edisi revisi. London: Thames and Hudson Ltd.
- Boechari. 1981. *Ulah Para Pemungut Pajak di Dalam Masyarakat Jawa Kuna*, dalam **Majalah Arkeologi** (IV/1-2). Lembaga Arkeologi FSUI.
- Earle, Timothy K. 1982. **Prehistoric Economics and the Archaeology of Exchange**. New York: Academic Press.
- Earle, Timothy K. dan Jonathan Ericson. 1977. **Exchange Systems in Archaeological Perspective**. New York: Academic Press.
- Eriawatti J., Yusmaini. 1991. *Situs-situs Potensial Masa Majapahit, Kajian Toponim berdasarkan Perbandingan Data Teks-tual dan Peta*, Makalah dalam **Rapat Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik**. Trowulan, 18-23 November 1991.

- Groeneveldt, W.P. 1960. **Historical Notes on Indonesian and Malaya Compiled from Chinese Sources** Djakarta: Bhratara K.A.
- Haryono, Timbul. 1980. *Gambaran tentang Upacara Penetapan Sima*, **Arkeologi**, Th. III No. 1-2. Lembaga Arkeologi FS UI.
- Hodder, Ian & Clive Orton. 1976. **Spatial Analysis in Archaeology**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodder, Ian. 1978. *Social Organisation and Human Interaction: The Development of Some Tentative Hypotheses in terms of Material Culture*, dalam I. Hodder (ed.) **The Spatial Organisation of Culture**. University of Pittsburgh Press.
- Hodder, Ian. 1982. **Toward a Contextual Approach to Prehistoric Exchange**. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jennings, Jesse D. (ed.). 1979. **The Prehistory of Polynesia**. England: Harvard University Press.
- Kusumohartono, B. M. (1985). *Strategi Adaptasi Lingkungan, Pola Ekonomi, Dan Pelestarian Kekuasaan, Paparan Mengenai Beberapa Data Jaman Indonesia Kuna*. *Berkala Arkeologi*, 6(2), 33-47. <https://doi.org/10.30883/ljba.v6i2.442>
- _____. 1991. *Konsepsi 'Big Men' dalam Kehidupan Sosial - politik Indonesia Kuna*, Makalah dalam **Rapat Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik**. Trowulan, 18-23 November 1991.
- _____. 1993. *Artefak Logam Bagi Studi Pertukaran*, dalam **Proceedings AHPA IV 1991: Metalurgi Dalam Arkeologi**. Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan.
- Kusumohartono, B. (1993). *Situs Wonoboyo : Pemukiman Kuna Pada Jenjang Mana?*. *Berkala Arkeologi*, 13(3), 47-58. <https://doi.org/10.30883/ljba.v13i3.616>
- Leur, J.C. van. 1967. **Indonesian Trade and Society**. The Hague: W. van Hoeve.
- Malinowski, B. 1922. **Argonauts of the Western Pacific**. London: Routledge and Keegan Paul
- Mauss, Marcel. 1992. **Pemberian, Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno** (terjemahan Parsudi Suparlan). Yayasan Obor Indonesia.
- Meer, N.C. van Setten van der. 1979. **Sawah Cultivation in Ancient Java**. Canberra ANU Press. Miksic, John N. 1981. *Perkembangan Teknologi, Pola Ekonomi dan Penafsiran Data Arkeologi di Indonesia*, **Arkeologi**, Th. IV No. 1-2. Lembaga Arkeologi FS UI.
- Oliver, Douglas, 1955. **A Solomon Island Society; Kinship and Leadership among the Siuai of Bougainville**. Cambridge, Mass.: Harvard University.
- Paynter, Robert W. 1983. *Expanding the Scope of Settlement Analysis*, dalam J.A. Moore dan A.S. Keene (peny.) **Archaeological Hammers and Theories**. New York : Academic Press.
- Rappaport, Roy A. 1984. **Pigs for the Ancestors, Ritual in the Ecology of a New Guinea People**. New Haven and London : Yale University Press.
- Schiffer, Michael B., 1976. **Behavioral Archaeology**. New York : Academic Press.
- Soejono, R.P. (peny.). 1984. **Sejarah Nasional Indonesia, I**. PN Balai Pustaka.
- Sumadio, Bambang. 1984. **Sejarah Nasional Indonesia, II**. PN Balai Pustaka.
- Wuryantoro, Edhie., 1982. *Pajak dalam Abad Kesebelas dan Keduabelas*, dalam **MISI** (XI/01). FSUI.